



- 02** GOVERNMENTTODAY
OJK Ingatkan Stabilitas Bank Bila Bunga Kredit Rakyat 5%
- 05** HAJI 2026
89 Calon Jemaah Nonprosedural Digagalkan Imigrasi Soetta
- 10** LISTSTYLE
Pilih Pilih Bronzer untuk Hindari Tampilan Kusam



Bus Tabrak Kereta di Bangkok, 8 Tewas

Kecelakaan maut antara bus dan kereta barang terjadi di Bangkok, Thailand, Sabtu (16/5/2026). Insiden tersebut menewaskan 8 orang yang seluruhnya merupakan penumpang bus. Benturan keras memicu kebakaran hebat disertai beberapa ledakan kecil hingga membuat sejumlah kendaraan di sekitar lokasi ikut terdampak. Otoritas Thailand kini menyelidiki sistem palang perlintasan kereta api setelah muncul dugaan palang tidak berfungsi normal saat bus terjebak di jalur rel sebelum dihantam kereta. Dalam foto Reuters, petugas layanan darurat terlihat melakukan evakuasi di lokasi kecelakaan di kawasan Jalan Asok-Din Daeng, Bangkok, sementara bangkai bus tampak hangus terbakar di dekat rel kereta. (ist.reuters)

Perbandingan Kekuatan Cadangan Minyak Darurat (Estimasi per Maret 2026)



STOK MINYAK DUNIA DEKATI TITIK KRITIS

Tarif Penerbangan RI Bisa Naik 35%



Cadangan minyak dunia yang terus menyusut dan mendekati level kritis mulai berdampak langsung pada sektor penerbangan. Kenaikan harga avtur bakal memicu maskapai mengerek harga tiket pesawat domestik hingga 35%, demi menutup kenaikan biaya operasional. Situasi ini menyebabkan kekhawatiran baru terhadap inflasi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga ancaman perlambatan ekonomi global. Kondisi semakin rumit karena ketidakpastian di Selat Hormuz masih berlanjut. Pemerintah Iran menyatakan jalur pelayaran strategis itu baru akan dibuka kembali setelah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel berakhir. Iran juga berencana menerapkan pungutan biaya transit bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz, jalur distribusi sekitar 20 persen minyak dunia. Di tengah tekanan tersebut, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G7 dijadwalkan bertemu di Paris mulai Senin (18/5/2026) untuk membahas gejolak tersebut. **BACA HAL 11...**

OJK INGATKAN STABILITAS BANK BILA BUNGA KREDIT RAKYAT 5%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang akan menggulirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen per tahun. OJK menilai kebijakan tersebut positif untuk mendorong ekonomi masyarakat kecil, namun tetap harus dibarengi penguatan tata kelola dan mitigasi risiko di sektor perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan program kredit rakyat dapat menjadi peluang bisnis berkelanjutan bagi bank sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok unbankable.

“Program Kredit Rakyat yang diinisiasi Pemerintah dinilai sangat baik, dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat



Kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu, 13 Mei 2026

terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, Ahad (17/5/2026).

Meski demikian, OJK mengingatkan perbankan tetap harus menjaga kualitas manajemen risiko agar program berjalan sehat dan tidak membebani industri keuangan. Menurut Dian, bank perlu

meningkatkan kualitas tata kelola sesuai risk appetite dan kemampuan masing-masing lembaga.

“Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” kata Dian.

Selain pengawasan dan stress test, perbankan juga diminta menyiapkan pencadangan yang memadai guna mengantisipasi potensi kredit bermasalah. OJK turut menekankan pentingnya penerapan prinsip 5C dalam penyaluran kredit, yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy agar kualitas pembiayaan tetap sehat di tengah ekspansi kredit murah.

“OJK juga akan senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dari sisi bunga kredit, OJK mencatat rerata tertimbang suku bunga kredit rupiah pada Maret 2026 berada di level 8,76 persen. Angka itu turun dibanding Februari 2026 sebesar 8,80 persen dan Maret 2025 yang mencapai 9,20 persen.

Penurunan bunga kredit ditopang turunnya suku bunga kredit produktif, baik Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi, yang masing-masing turun 67 basis poin dan 68 basis poin secara tahunan. Di saat bersamaan, rerata tertimbang Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah juga turun 55 basis poin menjadi 2,66 persen.

Kondisi tersebut dipengaruhi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dari 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi 4,75 persen pada Maret 2026. OJK menilai tren penurunan bunga kredit masih berpotensi berlanjut, tergantung strategi masing-masing bank dalam mengelola biaya dana dan meningkatkan porsi dana murah.

“OJK senantiasa menghimbau agar perbankan dapat secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya agar tetap sejalan dengan kondisi pasar,” kata Dian.

OJK juga menyoroti dinamika global yang dapat memengaruhi arah suku bunga domestik. Salah satunya keputusan bank sentral Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,50 hingga 3,75 persen.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan segera mengucurkan kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen per tahun untuk membantu masyarakat kecil. (wid,ist,rls/dya)

RIWAYAT PENYALURAN DAN SUKU BUNGA KUR

TAHUN 2025

- Suku Bunga: 6%
- Total Realisasi: Rp240,09 Triliun (per November)

TAHUN 2024

- Suku Bunga: 6%
- Total Realisasi: Rp289,67 Triliun

TAHUN 2023

- Suku Bunga: 6%
- Total Realisasi: Rp260,09 Triliun

TAHUN 2022

- Suku Bunga: 3% (Subsidi Khusus)
- Total Realisasi: Rp365,50 Triliun

TAHUN 2021

- Suku Bunga: 3% (Subsidi Khusus)
- Total Realisasi: Rp282,20 Triliun

TAHUN 2020

- Suku Bunga: 6%
- Total Realisasi: Rp198,53 Triliun

TAHUN 2019

- Suku Bunga: 7%
- Total Realisasi: Rp140,10 Triliun

Hingga Mei KUR Usaha Mikro Capai Rp 70 T

nasional yang mencapai Rp96 triliun.

“Dari total alokasi KUR yang mencapai Rp96 triliun per tanggal 3 Mei 2026, sekitar Rp70 triliun disalurkan ke sektor usaha mikro,” ujar Maman dalam keterangan resmi di Jakarta.

Menurut Maman, pembiayaan kepada pelaku usaha mikro menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebab, mayoritas pelaku usaha mikro berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal.

Pemerintah, kata dia, terus mengoptimalkan sektor usaha mikro dan kecil sebagai ujung tombak pengurangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan, termasuk penyaluran KUR yang menyasar masyarakat desil 1 atau kelompok sangat miskin hingga desil 4 yang masuk kategori rentan miskin.

Selain memperluas akses pembiayaan, Kementerian UMKM juga mendorong pemanfaatan fasilitas publik milik pemerintah,

swasta, hingga BUMN sebagai ruang usaha produktif bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.

Menurut Maman, langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih kolaboratif sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru, terutama bagi generasi muda.

Pertumbuhan kredit multiguna perbankan terus melambat di tengah tekanan daya beli masyarakat. Data Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit multiguna hingga Maret 2026 mencapai Rp1.391,9 triliun atau tumbuh 8,3 persen secara tahunan (year on year/yoy). Namun, angka itu lebih rendah dibanding pertumbuhan Februari 2026 yang masih berada di level 8,7 persen.

Meski melambat, survei perbankan Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit konsumsi pada kuartal II-2026 masih akan diprioritaskan untuk segmen KPR/KPA, disusul kredit multiguna dan kredit tanpa agunan (KTA). (tin,ist/dya)

MENTERI Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengungkapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor usaha mikro telah mencapai sekitar Rp70 triliun hingga 3 Mei 2026. Nilai tersebut menjadi bagian terbesar dari total realisasi penyaluran KUR

DPR INGATKAN JANGAN SAMPAI IKN JADI 'KOTA HANTU'

Setelah Putusan MK soal Jakarta Tetap Ibu Kota Negara

Bayang-bayang 'kota hantu' Ibu Kota Nusantara (IKN) mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara hingga terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan pusat pemerintahan. Putusan tersebut memicu kekhawatiran bila proyek raksasa yang telah menghabiskan ratusan triliun rupiah itu justru berpotensi kehilangan arah apabila tidak segera dipastikan aktivitas pemerintahan berjalan di kawasan baru tersebut.

Dalam pidatonya, Puan mengatakan DPR bersama pemerintah hanya akan melanjutkan pembahasan empat rancangan undang-undang pada masa sidang kali ini. "DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat satu terhadap beberapa rancangan undang-undang," kata Puan di hadapan anggota dewan.

Tidak masuknya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 langsung memunculkan perhatian publik dan kelompok masyarakat sipil. Pasalnya, tahapan Pemilu 2029 dinilai semakin dekat sementara pembahasan revisi regulasi pemilu belum juga menemukan titik terang.

Meski belum masuk daftar



prioritas resmi DPR, Puan menegaskan pembahasan mengenai RUU Pemilu sebenarnya masih terus berlangsung di internal partai-partai politik maupun antarfraksi di

parlemen. Ia menyebut komunikasi dilakukan melalui jalur formal maupun informal.

"Ini kan memang waktunya kalau dikatakan sudah mendekati waktunya,

Ekonom Soroti Dana Rp147 T untuk IKN

BESARNYA anggaran negara yang telah digelontorkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara hingga terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan pusat pemerintahan. Di tengah ketidakpastian itu, kekhawatiran soal risiko mangkraknya proyek IKN mulai menguat.

Hingga saat ini, total anggaran yang telah dikucurkan negara untuk pembangunan IKN mencapai Rp147,41 triliun. Mayoritas pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada periode 2022-2024, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp89 triliun.

Sementara sisanya sekitar Rp58 triliun berasal dari anggaran 2025-2026 pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk merampungkan kawasan inti pemerintahan.

Pada hal, proyek IKN yang mulai digagas pada era Presiden Joko Widodo itu diperkirakan membutuhkan total investasi hingga

Rp466 triliun. Saat itu, pemindahan ibu kota disebut sebagai strategi untuk mendorong pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan nasional di luar Pulau Jawa.

Namun, Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai proyek IKN sejak awal memang menyimpan banyak persoalan. Menurutnya, pembangunan dilakukan terlalu tergesa-gesa tanpa perencanaan matang, terutama terkait kebutuhan riil pemindahan pusat pemerintahan.

"Diskusi tentang manajemen krisis masuk ke masalah IKN yang menjadi beban pemborosan anggaran negara dan akan sia-sia pajak rakyat yang diinvestasikan secara sembrono dengan keputusan politik yang salah kaprah," kata Didik di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Didik menilai pemerataan pembangunan sebenarnya tidak harus dilakukan dengan memindahkan ibu kota negara. Sebab, biaya relokasi pemerintahan dinilai sangat besar, terlebih jika pembangunan dipaksakan berjalan cepat.

Ia bahkan mengibaratkan proyek IKN seperti kisah Roro Jonggrang yang meminta syarat mustahil kepada Bandung Bondowoso, yakni membangun seribu candi dalam semalam. Analogi itu menggambarkan ambisi pembangunan yang dinilai terlalu dipaksakan dalam waktu singkat.

"Kritik terhadap proyek IKN sebenarnya sudah lama disampaikan oleh banyak kalangan. Mulai dari akademisi, perguruan tinggi, hingga masyarakat umum. Namun tetap berjalan, meski pemerintah baru dinilai belum benar-benar siap menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan aktif," ungkap pendiri Institute for Development of Economics and Finance atau Indef tersebut.

Meski begitu, Didik menegaskan kondisi saat ini bukan lagi soal menghentikan proyek. Menurutnya, yang lebih penting adalah mencari jalan keluar agar aset-aset yang sudah dibangun tidak berubah menjadi kawasan mangkrak atau kota mati.

"Aset besar di IKN harus diselamatkan dengan ide-ide dan pemikiran yang out of the box," ujarnya.(wid,ist/kum)

DANA JUMBO IKN

Rincian pendanaan

APBN 2022-2024

Rp 89 Triliun

Anggaran tambahan 2025-2029

Rp 48,8 Triliun

Total sementara APBN untuk IKN

Rp 137,8 triliun

Puluhan Perusahaan

Sudah Masuk

- Perkembangan investasi IKN
- Total komitmen investasi tembus Rp225 triliun
- Sebanyak 57 perusahaan sudah menyatakan komitmen investasi
- Investasi swasta murni mencapai sekitar Rp72 triliun hingga awal 2026
- Investor China & Korea Selatan mulai masuk
- Lebih dari 48 perusahaan domestik sudah melakukan groundbreaking

Duitnya dari mana?

- Total kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp466 triliun hingga 2045
- Sekitar 80% pendanaan ditargetkan dari investasi non-APBN
- Sisanya berasal dari APBN



betul. Namun bagaimana yang terbaik untuk rakyat adalah yang paling kami utamakan. Jadi kita akan terus melakukan pembicaraan sebaik-baiknya, informal dan formal," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut usai sidang paripurna.

Menurut Puan, seluruh pimpinan partai politik dan anggota DPR memiliki keinginan yang sama agar Pemilu 2029 dapat berlangsung secara jujur, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Karena itu, DPR disebut tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan terkait revisi UU Pemilu.

"Bagaimana yang terbaik untuk rakyat adalah yang paling kami utamakan," ucap Puan menegaskan.

Perdebatan mengenai revisi UU Pemilu sendiri terus berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah pihak mendesak DPR segera menyelesaikan revisi aturan tersebut mengingat tahapan pemilu akan segera dimulai. Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu saat ini, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. (wid,rls,kum/dya)

SIMPANG SIUR PENCARIAN WNI KORBAN KAPAL TENGGELAM DI MALAYSIA

23 Orang Ditemukan Selamat dan 16 Meninggal

Tragedi kapal tenggelam yang membawa warga negara Indonesia (WNI) di perairan Pulau Pangkor, Negara Bagian Perak, Malaysia, kini masih menyisakan duka dan tanda tanya. Setelah sebelumnya otoritas Malaysia menyatakan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) dihentikan, perkembangan terbaru justru menunjukkan pencarian korban masih terus dilanjutkan karena diduga masih ada penumpang yang belum ditemukan.

Insiden ini bermula pada Senin (11/5/2026) dini hari waktu setempat, ketika sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia mengalami kecelakaan di perairan lepas pantai Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Kapal tersebut diyakini membawa puluhan WNI yang sebagian besar diduga merupakan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI).

Pada awal kejadian, informasi yang diterima otoritas Malaysia menyebutkan jumlah penumpang mencapai 37 orang. Namun dalam perkembangan terbaru, angka tersebut dinilai tidak akurat dan kemungkinan lebih banyak dari perkiraan awal.

Direktur Maritim Negara Bagian Perak, Mohd Shukri Khotob, menyampaikan hingga hari keenam operasi, total 39 korban telah ditemukan.

"Sejauh ini, total 39 korban telah ditemukan, terdiri dari 23 orang



Sejumlah petugas Malaysia dalam upaya pencarian WNI korban kapal tenggelam di Perak, Malaysia. (penguatkuasaan Maritim Malaysia)

selamat dan 16 lainnya dipastikan meninggal dunia. Informasi awal yang diperoleh pada hari pertama operasi menyebutkan jumlah korban sebanyak 37 orang, namun angka tersebut diyakini tidak akurat dan diduga masih ada korban yang belum

ditemukan," ujar Mohd Shukri dalam keterangannya di Kuala Lumpur, Minggu (17/5/2026).

Menurut Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) Negeri Perak, pada hari pertama operasi penyelamatan, petugas tidak

langsung menemukan bangkai kapal. Tim SAR hanya menemukan para korban dalam kondisi terapung di tengah laut. Kondisi itu membuat identitas kapal maupun detail perjalanan para penumpang hingga kini belum diketahui secara pasti.

Proses pencarian kemudian dilakukan secara besar-besaran dengan melibatkan berbagai unsur keamanan Malaysia, mulai dari aset Maritim Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM), Kepolisian Maritim, hingga kapal nelayan lokal yang ikut membantu menyisir lokasi kejadian.

Area pencarian diperluas ke sejumlah titik perairan di sekitar Pulau Pangkor, Pulau Kelumpang, Pulau Sangga Kechil, dan Pulau Buloh. Tim gabungan melakukan penyisiran laut selama berhari-hari untuk mencari kemungkinan korban lain yang masih hilang.

Sebelumnya, sempat muncul informasi bahwa operasi SAR telah dihentikan pada Sabtu setelah tidak ditemukan perkembangan baru di lokasi pencarian. Namun data terbaru menunjukkan jumlah korban bertambah menjadi 39 orang, sehingga operasi kembali dilanjutkan karena diduga masih ada korban yang belum ditemukan.

Korban meninggal terdiri dari laki-laki dan perempuan dewasa. Seluruh jenazah yang ditemukan telah diserahkan kepada pihak kepolisian Malaysia sebelum dibawa ke Rumah Sakit Teluk Intan dan Rumah Sakit Taiping guna proses identifikasi serta penyelidikan lebih lanjut. (wid,ist,kum/dya)

Klaim JHT dan JKP Melonjak **Buntut PHK**



waktu pelayanan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cianjur. Masyarakat terlihat tertib dan teratur saat mengajukan klaim meski sepanjang bulan suci ramadhan mengalami peningkatan (ist.rdr)

terutama program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Maret 2026.

Kepala Eksekutif Pengawasan, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan meningkatnya jumlah pekerja yang terkena PHK menjadi faktor utama melonjaknya pencairan manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

"Fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program JHT dan JKP," ujar Ogi dalam keterangannya, dilihat Minggu (17/5/2026).

Berdasarkan data OJK, klaim JHT

pada Maret 2026 meningkat 14,1 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dengan nilai mencapai Rp1,85 triliun. Kenaikan tersebut dipicu semakin banyak pekerja yang mencairkan dana JHT setelah kehilangan pekerjaan akibat gelombang efisiensi dan PHK di berbagai sektor industri.

Lonjakan lebih tinggi terjadi pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). OJK mencatat klaim JKP meningkat hingga 91 persen secara tahunan.

Menurut Ogi, kenaikan tajam itu tidak hanya dipengaruhi bertambahnya pekerja terdampak PHK, tetapi juga adanya relaksasi syarat pencairan serta peningkatan manfaat JKP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program JKP.

"Klaim JKP juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen secara yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi

persyaratan klaim serta peningkatan manfaat," kata dia.

Di tengah meningkatnya pencairan dana jaminan sosial tersebut, OJK mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan dana perlindungan pekerja agar tetap sehat dalam jangka panjang. OJK menilai pengelolaan program jaminan sosial harus dilakukan secara lebih hati-hati dan adaptif terhadap kondisi ekonomi yang berubah.

"Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, diperlukan pengelolaan program yang prudent dan adaptif," ujar Ogi.

Menurut OJK, evaluasi berkala terhadap desain program maupun manfaat perlu terus dilakukan agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi nasional serta profil risiko peserta BPJS Ketenagakerjaan.

OJK berharap keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi pekerja dan kesehatan dana jaminan sosial tetap dapat dipertahankan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya tren PHK. (wid,ist/dya)

89 CALON JEMAAH NONPROSEDURAL DIGAGALKAN IMIGRASI SOETTA

Pengawasan lebih ketat dilakukan di pintu keimigrasian Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menunda keberangkatan 89 calon jemaah haji non-prosedural selama musim haji tahun ini. Mayoritas menggunakan visa kerja atau iqomah untuk masuk ke Arab Saudi dengan tujuan berhaji.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika, mengatakan penundaan dilakukan sebagai upaya mencegah praktik haji non-prosedural.



Jemaah Haji Indonesia saat diperiksa petugas imigrasi Arab Saudi lewat Mekkah Route Bandara Soekarno-Hatta.

"Berbicara haji non-prosedural sebagaimana mungkin juga tersampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah, bahwa haji harus menggunakan visa haji dan terdaftar.

Saat ini khusus di Soekarno-Hatta, kami telah melakukan penundaan keberangkatan sejumlah 89, gitu," kata Galih saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (17/5/2026).

10 NEGARA DENGAN KUOTA HAJI TERBESAR 2026

	Indonesia 221.000 jemaah
	Pakistan 179.210 jemaah
	India 175.000 jemaah
	Bangladesh 127.000 jemaah
	Iran 87.550 jemaah
	Nigeria 66.910 jemaah
	Aljazair 41.300 jemaah
	Turki 37.770 jemaah
	Mesir 35.375 jemaah
	Sudan 32.000 jemaah

Timwas Haji DPR: Waspadai Hantavirus

rukun haji dengan lancar.

"Nah, salah satu tantangan kita hari ini adalah Hantavirus. Oleh karena itu, kepada jemaah haji seluruh Indonesia untuk lebih hati-hati, terutama yang punya sakit paru-paru nih," kata Eem. Ia juga mengimbau penggunaan masker di tempat umum sebagai langkah pencegahan.

"Harus hati-hati, mungkin juga diusahakan di tempat umum pakai masker walaupun memang itu tidak seganas seperti COVID, tetapi tetap antisipasi itu saya kira wajib. Dan tentu menjaga kebersihan," tutur dia.

Bagi jemaah yang sedang sakit, Eem mendoakan agar segera pulih. Ia menyebut puncak pelaksanaan haji masih beberapa hari lagi.

"Tetapi ketika sudah sampai di sana, saya kira kan ini haji yang paling utamanya itu kan mulai tanggal 9 ya, atau kalau di bulan Masehi itu berarti mulai 26. 26. Jadi sebelum itu bisa mungkin umrah atau bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang untuk menjaga kesehatan kita," kata dia.

Ia menambahkan jemaah masih memiliki waktu untuk mempersiapkan kondisi fisik sebelum puncak ibadah. "Jadi ini kita masih ada waktu

nih sampai tanggal 26. Jadi sekarang harus mulai jaga kesehatan, jaga imun, makan makanan yang sehat, yang bisa membuat kita lebih bugar gitu, obat-obatan, seperti itu," tutup dia.

Terpisah, Maman Imanul Haq mengatakan kehadiran Timwas bertujuan memastikan seluruh layanan haji berjalan sesuai kontrak.

"Ada tiga hal besar yang menjadi perhatian kami," kata Maman di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Menurut Maman, aspek transportasi menjadi perhatian utama mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang ekstrem. "Kita ingin memastikan bus-bus yang digunakan, baik antar kota maupun bus selawat, memiliki standar keamanan dan kenyamanan yang tinggi, mengingat cuaca di sana diprediksi sangat ekstrem," kata Maman. Selain mengenai transportasi, Timwas juga akan memeriksa langsung kondisi akomodasi dan layanan catering.

"Kami akan cek langsung ke lapangan, terutama di Arafah dan Mina. Apakah luas tenda memadai untuk jumlah jemaah kita? Jangan sampai ada jemaah yang tidak mendapatkan tempat tidur yang layak," ujarnya. (gus,rls,ist/dya)

Galih mengungkapkan, penindakan terbaru dilakukan dua hari lalu terhadap 32 orang calon jemaah.

"Yang terakhir dua hari yang lalu itu 32, gitu. Modusnya bermacam-macam, tapi umumnya menggunakan visa kerja ataupun Iqomah, yang mana mungkin ya itu untuk memberikan kesan bahwa mereka telah tinggal di sana. Namun pada akhirnya tujuan utamanya adalah haji," ujarnya.

Menurut dia, pengawasan dilakukan melalui satuan tugas gabungan yang melibatkan Imigrasi, Polresta Bandara Soekarno-Hatta, serta Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

"Nah, dengan kita ada Satgas, dengan bantuan Polresta Bandara pun juga dari Kementerian Haji dan Umrah kita tergabung dalam Satgas, dan saat ini untuk Soekarno-Hatta sendiri telah melakukan penundaan keberangkatan sejumlah 89. Seperti itu. Harapannya ini pun juga memberikan optimalisasi dalam filter," kata Galih.

Adapun, Galih menjelaskan ada beberapa calon jemaah haji non-prosedural yang berangkat dengan menggunakan jalur terbang komersil.

"Jadi menggunakan flight biasa, flight komersil di T2 ataupun T3, gitu," tambahnya. "Entah dia wisata dulu, ke Korea, ke Malaysia, habis itu ke tempat kerja. Nanti dari situ dia baru apply visa gitu," jelasnya. Galih menegaskan, jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji harus menggunakan visa haji resmi dan terdaftar secara prosedural agar tak mengalami masalah saat masuk ke Arab Saudi.

Di sisi lain, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta mencatat sekitar 30 ribu jemaah haji telah menjalani proses clearance keimigrasian lewat fasilitas Makkah Route di Bandara Soekarno-Hatta. Program ini memungkinkan proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi dilakukan sebelum jemaah terbang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika, mengatakan Bandara Soekarno-Hatta dijadwalkan melayani total 35.285 jemaah haji melalui skema Makkah Route pada musim haji tahun ini.

"Saat ini kita ada di fasilitas Makkah Route, yang mana dari tadi proses keberangkatan di embarkasi untuk jemaah haji telah dilakukan clearance keimigrasian, sehingga yang seharusnya clearance keimigrasian dari Arab Saudi dilakukan di negara Arab Saudi, saat ini dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta," kata Galih saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (17/5/2026).

Galih menyebut hingga saat ini sekitar 30 ribu jemaah telah menjalani proses clearance tersebut.

"Untuk Bandara Soekarno-Hatta sendiri kita terjadwalkan untuk menyelesaikan sekitar 35.285 dan saat ini baru 30.000 something yang telah dilakukan clearance-nya, gitu," ujarnya. (gus,ist,kum/dya)

ANGGOTA Timwas Haji DPR Neng Eem Marhamah Zulfa meminta jemaah haji asal Indonesia menjaga kondisi kesehatan, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus Hantavirus.

Politikus PKB tersebut mengimbau jemaah yang memiliki penyakit paru-paru perlu meningkatkan kewaspadaan.

"Jadi jemaah haji hari ini harus lebih waspada karena hari ini kita tahu ada Hantavirus ya, terutama mungkin yang punya penyakit paru-paru. Nah, ini harus lebih hati-hati," kata Eem di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (17/5/2026).

Eem menekankan aspek kesehatan harus menjadi prioritas agar jemaah dapat menjalankan

DPR Pertanyakan Anggaran RTH Kota Malang Hanya Rp350 Juta

Alun-alun Merdeka, salah satu ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang. (Santi/Lentera)



MALANG- DPRD Kota Malang mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam memenuhi target penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pasalnya, anggaran yang disiapkan di 2026 hanya sebesar Rp350 juta.

Nilai tersebut merosot tajam dari proyeksi awal Rp7,5 miliar, dinilai tidak

sebanding dengan besarnya kebutuhan untuk mengejar kewajiban penyediaan RTH sebesar 20 persen dari total luas wilayah Kota Malang.

"Alokasi anggaran ini jelas memicu kekhawatiran terhadap efektivitas implementasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RTH yang saat ini masih dalam pembahasan," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, dikutip Minggu (17/5/2026).

Ditegaskannya, regulasi yang disusun tidak boleh berhenti sebatas dokumen hukum, tanpa dukungan kebijakan anggaran yang memadai. "Jangan sampai Perda ini hanya sekadar Perda, tapi tidak bisa implementatif," tegas Dito.

Menurutnya, alokasi Rp350 juta sangat jauh dari cukup untuk membiayai pengelolaan, pemeliharaan, dan

penambahan kawasan RTH di seluruh wilayah Kota Malang.

Sementara itu, hingga saat ini capaian RTH publik di Kota Malang baru berada di kisaran 17 persen. Dito menyebut, masih terdapat selisih cukup besar yang harus dikejar untuk memenuhi target ideal tersebut.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RTH ini juga menilai, salah satu persoalan mendasar terletak pada belum optimalnya pendataan dan pengamanan aset milik daerah.

Ia menyebut banyak lahan yang semestinya dapat difungsikan sebagai RTH justru telah mengalami alih fungsi, bahkan sebagian diduga telah berpindah tangan. "RTH itu fenomenanya kompleks, banyak aset daerah yang sudah alih fungsi dan alih tangan," katanya.

Karena itu, Dito meminta pemerintah kota segera melakukan inventarisasi ulang terhadap seluruh aset, termasuk untuk memetakan secara akurat luasan RTH publik maupun privat.

Selain itu, Dito juga menyoroti proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan yang dinilai masih belum

optimal.

Menurutnya, keterlambatan administrasi tersebut berdampak langsung terhadap pemenuhan kewajiban penyediaan RTH privat sebesar 10 persen. "Kalau proses serah terima PSU dipercepat, maka luasan RTH privat juga akan lebih cepat terdata dan bisa diakui," katanya.

Dalam Ranperda yang tengah dibahas, DPRD juga mendorong pengetatan aturan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Setiap kegiatan yang dilakukan di kawasan RTH nantinya wajib memperoleh izin resmi dari Wali Kota Malang.

Ketentuan tersebut diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan lahan hijau untuk kepentingan komersial maupun kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, menyebut dalam pembahasan Ranperda RTH, salah satu poin penting yang akan diberlakukan adalah mengembalikan fungsi lahan fasilitas umum (fasum) yang selama ini tidak sesuai peruntukan di sejumlah perumahan. (Santi/Dya)

Wilayah 3T Belum Tersentuh MBG, Pemkab Malang Usul 20 Dapur Baru

MALANG- DPRD Kota Malang mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam memenuhi target penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pasalnya, anggaran yang disiapkan di 2026 hanya sebesar Rp350 juta.

Nilai tersebut merosot tajam dari proyeksi awal Rp7,5 miliar, dinilai tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan untuk mengejar kewajiban penyediaan RTH sebesar 20 persen dari total luas wilayah Kota Malang.

"Alokasi anggaran ini jelas memicu kekhawatiran terhadap efektivitas implementasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RTH yang saat ini masih dalam pembahasan," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, dikutip Minggu (17/5/2026).

Ditegaskannya, regulasi yang disusun tidak boleh berhenti sebatas dokumen hukum, tanpa dukungan kebijakan anggaran yang memadai. "Jangan sampai Perda ini hanya sekadar Perda, tapi tidak bisa implementatif," tegas Dito.

Menurutnya, alokasi Rp350 juta sangat jauh dari cukup untuk membiayai pengelolaan, pemeliharaan, dan penambahan kawasan RTH di seluruh wilayah Kota Malang.

Sementara itu, hingga saat ini capaian RTH publik di Kota Malang baru berada di kisaran 17 persen. Dito menyebut, masih terdapat selisih cukup besar yang harus dikejar untuk memenuhi target ideal tersebut.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RTH ini juga menilai, salah satu persoalan mendasar terletak pada belum optimalnya pendataan dan pengamanan aset milik daerah.

Ia menyebut banyak lahan yang semestinya dapat difungsikan sebagai RTH justru telah mengalami alih fungsi, bahkan sebagian diduga telah berpindah tangan. "RTH itu fenomenanya kompleks, banyak aset daerah yang sudah alih fungsi dan alih tangan," katanya.

Karena itu, Dito meminta pemerintah kota segera melakukan inventarisasi ulang terhadap seluruh

aset, termasuk untuk memetakan secara akurat luasan RTH publik maupun privat.

Selain itu, Dito juga menyoroti proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan yang dinilai masih belum optimal.

Menurutnya, keterlambatan administrasi tersebut berdampak langsung terhadap pemenuhan kewajiban penyediaan RTH privat sebesar 10 persen. "Kalau proses serah terima PSU dipercepat, maka luasan RTH privat juga akan lebih cepat terdata dan bisa diakui," katanya.

Dalam Ranperda yang tengah dibahas, DPRD juga mendorong pengetatan aturan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Setiap kegiatan yang



Bupati Malang, Sanusi ketika meninjau para siswa SDN 1 Pulungdowo, Kecamatan Tumpang yang sedang menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). (Prokopim Kab. Malang)

dilakukan di kawasan RTH nantinya wajib memperoleh izin resmi dari Wali Kota Malang.

Ketentuan tersebut diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan lahan hijau untuk kepentingan komersial maupun kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan. (Santi/Dya)



Seseorang dibawa ke rumah sakit di Bunia, provinsi Ituri, di Republik Demokratik Kongo pada hari Sabtu. (Ist.reuters)

WABAH EBOLA DITETAPKAN

JADI DARURAT KESEHATAN INTERNASIONAL

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) resmi menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Hal ini setelah jumlah kasus dan korban meninggal terus meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan bahwa keputusan itu diambil menyusul laporan lebih dari 300 kasus suspek Ebola dengan total 88 kematian. Meski ditetapkan sebagai darurat global, WHO menegaskan wabah ini belum masuk kategori pandemi seperti COVID-19 dan meminta negara-negara tidak menutup perbatasan internasional.

Wabah kali ini dipicu oleh virus Ebola varian Bundibugyo, salah satu strain langka yang hingga kini belum memiliki vaksin maupun terapi khusus yang disetujui. WHO mencatat kemunculan strain Bundibugyo tergolong jarang dan baru dilaporkan tiga kali sejak pertama ditemukan.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan hingga Sabtu, 16 Mei 2026, terdapat 336 kasus suspek dan 87 hingga 88 kematian akibat penyebaran Ebola yang

berlangsung cepat di wilayah tersebut. Hampir seluruh kasus berasal dari Republik Demokratik Kongo, sementara dua kasus lainnya ditemukan di Uganda.

Kasus pertama dilaporkan di Provinsi Ituri, wilayah timur Kongo yang berbatasan langsung dengan Uganda dan Sudan Selatan. Otoritas kesehatan menyebut pasien pertama merupakan seorang perawat yang datang ke fasilitas kesehatan di Kota Bunia pada 24 April dengan gejala menyerupai Ebola.

Uganda juga mengonfirmasi satu kasus yang berasal dari Kongo. Pasien tersebut meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Kampala. WHO kemudian melaporkan satu kasus tambahan di ibu kota Uganda itu. WHO menyebut, "Kedua kasus tersebut tidak memiliki hubungan yang jelas satu sama lain dan kedua pasien tersebut telah melakukan perjalanan dari Kongo."

Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, Samuel-Roger

Kamba, mengatakan situasi semakin rumit karena strain Bundibugyo belum memiliki vaksin maupun pengobatan spesifik.

"Strain Bundibugyo tidak memiliki vaksin, tidak ada pengobatan spesifik," ujar Kamba.

Ia menambahkan, "Strain ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi, yang bisa mencapai 50 persen."

Varian Bundibugyo pertama kali ditemukan di distrik Bundibugyo, Uganda, saat wabah tahun 2007-2008 yang menginfeksi 149 orang dan menyebabkan 37 kematian. Kemunculan berikutnya terjadi pada 2012 di Isiro, Kongo, dengan 57 kasus dan 29 kematian.

Organisasi kemanusiaan Médecins Sans Frontières menilai laju penyebaran wabah kali ini sangat mengkhawatirkan. Manajer Program Darurat MSF, Trish Newport, mengatakan pihaknya tengah

menyiapkan respons skala besar.

"Jumlah kasus dan kematian yang kami lihat dalam waktu singkat, ditambah penyebaran ke beberapa zona kesehatan hingga lintas perbatasan, sangat mengkhawatirkan," kata Newport.

WHO juga memperingatkan jumlah kasus sebenarnya kemungkinan lebih besar dari data yang telah terdeteksi. Di sejumlah wilayah terdampak, fasilitas isolasi disebut sangat terbatas sehingga banyak pasien meninggal di rumah dan jenazah mereka ditangani langsung oleh keluarga. Gejala Ebola sendiri meliputi demam tinggi, muntah, pendarahan, hingga gagal organ.

Selain Kongo dan Uganda, kekhawatiran global juga meningkat karena wilayah wabah berada di jalur perlintasan internasional yang dekat dengan Sudan Selatan. WHO menilai mobilitas penduduk dan aktivitas perdagangan lintas negara membuat risiko penyebaran regional semakin tinggi.

Media internasional seperti Reuters, Associated Press, Financial Times, hingga Al Jazeera melaporkan bahwa kasus Ebola kini mulai terdeteksi di sejumlah kota besar seperti Kampala di Uganda dan Kinshasa di Kongo. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena penyebaran virus tidak lagi hanya berada di wilayah terpencil, tetapi mulai menjangkau pusat urban dengan mobilitas tinggi.

Financial Times menyebut kemunculan kasus di kota besar dapat memperumit pengendalian wabah, terlebih di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan dan menurunnya bantuan internasional. Ahli virologi dunia, Peter Piot, bahkan memperingatkan situasi bisa berubah menjadi krisis serius apabila virus menyebar luas di kota-kota besar Afrika. (wid,rla,rtr/dya)

Peneliti Sebut Risiko Masuk RI Kecil

POTENSI penyebaran virus Ebola di Indonesia disebut masih sangat kecil. Peneliti Global Health Security, Dicky Budiman, meminta masyarakat tidak panik, namun tetap menjaga perilaku hidup sehat di tengah status darurat kesehatan global yang diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization.

Dicky menjelaskan, risiko masuknya Ebola ke Indonesia memang ada, tetapi berada pada level rendah hingga menengah. "Saat ini risiko penyebaran di Indonesia rendah sampai menengah tapi nyata ada dan ada potensinya, walaupun tidak tinggi," ujarnya, Minggu (17/5/2026).

Ia menegaskan karakter

penularan Ebola berbeda dengan Covid-19. Menurutnya, virus Ebola tidak menyebar lewat udara bebas seperti SARS-CoV-2, melainkan membutuhkan kontak erat melalui cairan tubuh. Selain itu, proses transmisinya juga relatif lebih lambat dibanding virus pernapasan lain.

Meski demikian, ada sejumlah faktor yang dinilai bisa meningkatkan risiko penyebaran. Dicky menyoroti tingginya mobilitas internasional, urbanisasi di kawasan Afrika, konflik bersenjata yang menghambat isolasi dan pengendalian wabah, hingga potensi kasus lintas negara. Ia juga mengingatkan bahwa untuk jenis Ebola strain Bundibugyo masih

belum tersedia vaksin berlisensi.

"Risiko masuk ke Indonesia terutama lewat penerbangan internasional yang transit, pekerja migran, pelaut, pelaku perjalanan bisnis, ataupun kasus impor yang tidak terdeteksi," jelasnya.

Namun, Dicky menilai peluang terjadinya transmisi luas di Indonesia tetap jauh lebih rendah dibanding Covid-19 maupun influenza karena Ebola memerlukan kontak intens dan sangat dekat antarindividu. "Dan biasanya kalau pun terjadi outbreak lebih mudah dilokalisasi kalau cepat terdeteksi dan responsnya cepat," katanya. (wid,rls/dya)

WASPADA EBOLA, TAPI JANGAN PANIK

Apa Itu Ebola?

- Penyakit infeksi virus mematikan
- Menyerang manusia dan primata
- Disebabkan virus Ebola berbentuk filamen seperti benang

Status Global

- WHO menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan dunia (PHEIC)
- Africa CDC mencatat:
 - 13 kasus terkonfirmasi
 - 246 kasus suspek
 - 65 kematian masih diselidiki



Jangan Anggap Sepele! Sepatu Kekecilan Bisa Bahayakan Anak

Belakangan ini publik dibuat prihatin dengan kabar seorang siswa di Samarinda yang mengalami penurunan kondisi kesehatan hingga meninggal dunia. Salah satu hal yang turut menjadi sorotan dalam kasus tersebut adalah pemakaian sepatu yang ukurannya terlalu kecil dalam waktu lama.

Meski hingga kini belum ada pernyataan medis yang memastikan sepatu sempit menjadi penyebab utama, kasus tersebut membuka mata banyak orang tua tentang pentingnya memperhatikan kenyamanan alas khaki anak.

Penggunaan sepatu yang terlalu sempit atau tidak sesuai ukuran dalam jangka panjang memang dapat menimbulkan tekanan berlebih pada kaki, terutama saat anak aktif bergerak sepanjang hari. Sepatu bukan sekadar pelengkap seragam sekolah, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan dan tumbuh kembang khaki anak.

Pemilihan sepatu yang tepat dapat membantu menjaga posisi kaki tetap nyaman, mengurangi risiko lecet atau nyeri, serta mendukung aktivitas anak agar tetap lancar.

Karena itu, orang tua disarankan rutin memeriksa ukuran sepatu anak dan memastikan alas kaki yang digunakan masih layak serta nyaman dipakai sehari-hari.

Anak-anak dan remaja yang masih berada dalam masa pertumbuhan membutuhkan sepatu dengan ukuran dan bentuk yang tepat agar aktivitas sehari-hari tetap nyaman dan aman.

Sebaliknya, penggunaan sepatu yang terlalu sempit dalam jangka panjang dapat memicu berbagai

masalah kesehatan pada khaki.

Sepatu yang tidak sesuai ukuran sering kali dianggap masalah sepele. Padahal, menurut berbagai penelitian kesehatan kaki, alas kaki yang terlalu sempit dapat menyebabkan tekanan berlebih pada jari dan telapak khaki.

Tidak hanya menimbulkan lecet atau rasa nyeri, kondisi ini juga dapat memicu gangguan bentuk kaki hingga peradangan. Aktivitas yang mengharuskan anak berdiri atau berjalan dalam waktu lama akan membuat tekanan tersebut semakin besar.

Bunion atau Benjolan pada Sendi Ibu Jari

Bunion terjadi ketika jari-jari kaki terus berhimpitan akibat ruang sepatu yang terlalu sempit. Tekanan yang terjadi secara terus-menerus dapat memunculkan benjolan di area pangkal ibu jari kaki dan membuat posisi jari perlahan berubah.

Kondisi ini umumnya berkembang secara bertahap sehingga sering tidak disadari pada awal kemunculannya. Selain mengganggu bentuk kaki, bunion juga bisa menyebabkan rasa nyeri saat berjalan atau menggunakan alas kaki tertentu. Pada beberapa kasus, area yang menonjol bahkan dapat mengalami kemerahan, iritasi, atau terasa tidak nyaman saat terkena gesekan sepatu.

Hammer Toe

Hammer toe merupakan kondisi ketika jari kaki menekuk secara tidak normal. Biasanya hal ini dipicu oleh penggunaan sepatu yang terlalu pendek atau terlalu ketat dalam waktu lama sehingga memberi tekanan berlebih pada

jari khaki.

Kondisi ini dapat terjadi secara perlahan dan sering kali tidak disadari pada tahap awal. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat membuat anak merasa tidak nyaman saat berjalan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam beberapa kasus, hammer toe juga bisa menyebabkan rasa nyeri, lecet, atau kapalan akibat gesekan terus-menerus dengan sepatu. Oleh karena itu, pemilihan alas kaki yang nyaman dan sesuai ukuran sangat penting untuk membantu menjaga kesehatan khaki anak.

Metatarsalgia

Metatarsalgia adalah nyeri dan peradangan pada bagian depan telapak kaki. Risiko

ini bisa meningkat ketika anak memakai sepatu yang tidak pas

menjalani aktivitas fisik cukup tinggi, seperti berdiri lama, olahraga, atau praktik lapangan.

Keluhan biasanya berupa rasa nyeri, panas, atau tekanan pada telapak kaki saat digunakan untuk berjalan. Pada beberapa anak, rasa tidak nyaman tersebut juga bisa muncul setelah berdiri terlalu lama atau saat melakukan aktivitas fisik tertentu.

Jika terus terjadi, kondisi ini dapat memengaruhi postur berjalan dan membuat anak lebih cepat lelah saat beraktivitas. Kasus yang terjadi di Samarinda menjadi pengingat bahwa kesehatan anak bisa dipengaruhi oleh hal-hal kecil yang sering dianggap biasa.

Memastikan anak memakai sepatu yang tepat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bagian dari menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka sehari-hari. Sepatu dengan ukuran yang sesuai dan bahan yang nyaman dapat membantu menjaga bentuk kaki tetap normal serta mengurangi risiko gangguan pada kaki di kemudian hari. (ist/dya)

Tips Memilih Sepatu Anak

- Pilih bagian depan sepatu yang cukup lebar agar jari kaki bisa bergerak bebas.
- Gunakan sol yang kokoh dan nyaman untuk menopang telapak Khaki.
- Pastikan penyangga tumit cukup kuat agar langkah anak tetap stabil.
- Sesuaikan jenis sepatu dengan aktivitas anak, terutama untuk kegiatan aktif.
- Biasakan mencoba sepatu sambil memakai kaus kaki agar ukurannya lebih pas.



Penelitian: Jarak Tempuh Mobil Listrik Turun 39% saat Cuaca Dingin



Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa kondisi cuaca memiliki pengaruh besar terhadap performa mobil listrik maupun hybrid, terutama pada jarak tempuh kendaraan. Suhu yang terlalu dingin maupun terlalu panas ternyata dapat membuat efisiensi kendaraan menurun cukup signifikan.

Riset yang dilakukan oleh lembaga otomotif AAA menggunakan tiga mobil listrik dan tiga mobil hybrid sebagai objek pengujian. Seluruh kendaraan diuji di laboratorium menggunakan alat dyno, yakni simulasi berkendara layaknya mobil melaju di atas treadmill dalam ruangan bersuhu terkontrol. Sistem pendingin dan pemanas kendaraan diatur pada suhu nyaman sekitar 72 derajat Fahrenheit atau sekitar 22 derajat Celsius.

Para peneliti kemudian membandingkan performa kendaraan pada tiga kondisi suhu berbeda, yaitu minus 6,7 derajat Celsius untuk mewakili cuaca dingin ekstrem, 23,9 derajat Celsius sebagai suhu normal, dan 35 derajat Celsius untuk kondisi panas.

Hasilnya menunjukkan bahwa cuaca panas tetap memengaruhi performa kendaraan listrik. Pada suhu 35 derajat Celsius, mobil listrik mengalami penurunan jarak tempuh rata-rata sekitar 8,5 persen. Efisiensinya pun turun hingga 10,4 persen dibandingkan saat digunakan pada suhu normal. Sementara itu, kendaraan hybrid mencatat penurunan efisiensi bahan bakar sekitar 12 persen.

Namun, dampak terbesar justru terjadi saat cuaca dingin. Ketika suhu berada di kisaran minus 6,7 derajat Celsius, efisiensi mobil listrik anjlok hingga 35,6 persen. Kondisi tersebut membuat jarak tempuh kendaraan berkurang rata-rata sampai 39 persen. Kendaraan hybrid juga mengalami penurunan performa cukup besar dengan efisiensi bahan bakar turun

sekitar 22,8 persen.

Direktur Teknik dan Penelitian Otomotif AAA, Greg Brannon, mengatakan bahwa kendaraan listrik memang bekerja optimal pada suhu sedang. Akan tetapi, cuaca dingin dapat mengurangi daya jelajah secara drastis. Ia juga mengaku cukup terkejut melihat penurunan efisiensi yang cukup besar pada kendaraan hybrid saat berada di suhu rendah.

Menurutnya, faktor iklim, biaya energi, hingga pola penggunaan kendaraan perlu menjadi pertimbangan penting sebelum seseorang memilih jenis kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.

Penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa teknologi kendaraan elektrifikasi masih

memiliki tantangan dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Meski dinilai lebih ramah lingkungan, performa baterai pada mobil listrik tetap sangat dipengaruhi suhu lingkungan, terutama ketika kendaraan digunakan di wilayah dengan musim dingin yang ekstrem.

Pengaruh Cuaca Ekstrem: Studi dari American Automobile Association (AAA) menunjukkan bahwa cuaca ekstrem sangat memengaruhi efisiensi baterai.

-Suhu Panas: Pada suhu sekitar 35 derajat celsius, jarak tempuh rata-rata mobil listrik turun sekitar 8,5%.

-Suhu Dingin: Cuaca dingin memiliki dampak yang lebih drastis, di mana efisiensi dan jarak tempuh dapat turun hingga 39% karena kebutuhan energi tambahan untuk pemanas kabin. (*)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Pilah Pilih Bronzer untuk Hindari Tampilan Kusam

Bronzer merupakan salah satu produk makeup yang dapat membantu mempertegas dimensi wajah sehingga tampak lebih hidup. Namun, tidak sedikit orang yang justru merasa kurang berhasil saat menggunakannya karena hasilnya terlihat kusam.

Dalam penggunaannya, bronzer memang membutuhkan ketelitian. Kesalahan kecil saja bisa membuat tampilan wajah terlihat tidak natural bahkan terkesan berantakan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara memilih bronzer yang tepat agar hasil riasan tetap maksimal. Berikut beberapa tips yang bisa kamu perhatikan.

Shade yang tepat

Banyak orang yang salah dalam memilih bronzer karena beranggapan bahwa warna yang lebih gelap akan membuat hasil makeup terlihat lebih maksimal. Padahal, penggunaan bronzer yang terlalu gelap atau cenderung abu-abu justru dapat membuat wajah tampak kusam dan terlihat lelah.

Sebaiknya, pilih bronzer atau contour dengan warna yang hanya satu hingga dua tingkat lebih gelap dari warna kulit asli agar hasilnya tetap natural.

Pemilihan warna yang terlalu keabu-abuan dapat membuat wajah terlihat pucat, sementara warna yang terlalu gelap atau terlalu oranye justru membuat tampilan makeup tampak tidak seimbang dan kurang harmonis.

Perhatikan undertone kulit

Kunci utama dalam memilih bronzer adalah memahami undertone kulit. Penggunaan bronzer dengan undertone yang tidak sesuai dapat menimbulkan efek bayangan yang terlihat kotor, bukan memberikan dimensi pada wajah, sehingga membuat tampilan menjadi kusam. Bagi pemilik undertone hangat atau netral, disarankan memilih bronzer dengan nuansa cokelat hangat.

Sementara itu, bagi yang memiliki undertone dingin, bronzer dengan warna taupe atau cokelat lembut dengan sentuhan keabu-abuan akan lebih cocok. Pemilihan warna yang tepat akan menghasilkan riasan yang tampak lebih natural, segar, dan berdimensi.

Pilih formula dengan hasil natural

Jenis formula bronzer turut menentukan hasil akhir riasan. Oleh karena itu, penting untuk memilih bronzer yang mudah dibaurkan dan sesuai dengan tipe kulit. Bagi pemilik kulit kering, penggunaan bronzer berbentuk krim atau cair dapat memberikan tampilan yang lebih segar dan menyatu dengan kulit.

Sebaliknya, untuk kulit berminyak, bronzer dalam bentuk padat lebih disarankan karena mampu menghasilkan efek matte yang natural. Pada dasarnya, bronzer yang baik adalah yang mudah dibaurkan sehingga dapat menyatu dengan foundation, bukan hanya menempel di

permukaan kulit.

Tampilan kusam tidak hanya dipengaruhi oleh pemilihan warna, tetapi juga oleh hasil akhir dari produk yang digunakan.

Tes warna di area rahang-pipi

Banyak orang mencoba warna bronzer di area tangan, padahal warna kulit tangan sering kali berbeda dengan wajah. Hal ini dapat menyebabkan warna bronzer terlihat tidak sesuai saat diaplikasikan, seperti tampak abu-abu, terlalu gelap, atau bahkan membuat wajah terlihat kusam.

Coba dengan swatch di rahang atau pipi pada bagian bawah, lalu lihat di cahaya natural. Kalau bronzer atau kontur menyatu seperti bayangan alami dan tidak membuat wajah terlihat abu-abu atau kotor, itu tanda warnanya cocok. Warna yang tepat harus memberikan dimensi, bukan mematikan complexion.

Perhatikan cara aplikasinya

Selain memilih bronzer yang sesuai, teknik pengaplikasian juga perlu diperhatikan agar hasilnya tidak terlihat aneh atau kusam. Gunakan kuas berukuran agak besar dan ambil produk secukupnya agar hasilnya tipis serta berdimensi lembut.

Aplikasikan dengan gerakan memutar secara halus, bukan diseret, supaya warna dapat menyatu lebih natural dengan kulit dan tidak meninggalkan garis yang terlalu tegas. Dengan pemilihan warna dan teknik yang tepat, tampilan makeup

bronzy bisa terlihat natural dan lebih sempurna. Riasan juga akan tampak lebih hangat, segar, dan membantu memberi efek wajah yang lebih berdimensi tanpa terlihat berlebihan. (Nabilla - mahasiswa UINSA, berkontribusi dalam tulisan ini)

Bronzer vs contour apa bedanya?

Contour

Memahat, meniruskan, dan mempertegas fitur wajah (hidung, tulang pipi, rahang).

Bronzer

Memberikan efek segar, hangat, dan glowing agar wajah tidak terlihat datar setelah foundation.



Stok Minyak Dunia ...dari hal 1

Krisis energi global pada 2026 disebut memasuki fase paling serius dalam sejarah modern setelah konflik di Timur Tengah mengganggu distribusi minyak dan gas dunia. Penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, membuat sekitar seperlima pasokan minyak dan gas global terdampak. Situasi tersebut memicu lonjakan harga energi sekaligus memperbesar kekhawatiran terhadap ketahanan cadangan minyak dunia.

International Energy Agency dikutip Minggu (17/5/2026) memperingatkan pasar energi global kini menghadapi tekanan besar di tengah naiknya harga minyak mentah dunia yang telah melampaui 120 dollar AS per barel. Kepala IEA, Fatih Birol, menyebut dunia sedang menghadapi "tantangan ekonomi dan energi besar" akibat gejolak geopolitik yang memicu gangguan rantai pasok energi global.

Kekhawatiran itu semakin meningkat karena konflik di Timur Tengah dinilai berpotensi meluas ke kawasan lain. Bahkan, harga minyak Brent sempat menyentuh level tertinggi dalam empat tahun terakhir pada akhir April 2026.

Gangguan pasokan energi kali ini dinilai berbeda dibanding krisis sebelumnya karena dampaknya menjalar hampir ke seluruh kawasan dunia, terutama negara berkembang yang sangat bergantung pada impor bahan bakar minyak. Laporan Al Jazeera yang dikutip pada 13 Mei 2026 menyebut negara berkembang menjadi pihak paling rentan karena memiliki cadangan minyak strategis yang terbatas.

Pada Maret 2026, negara-negara anggota IEA sebenarnya telah melepas sekitar 400 juta barel cadangan minyak darurat untuk meredam lonjakan harga global. Namun langkah itu justru memperlihatkan ketimpangan besar antara negara maju dan berkembang dalam hal cadangan energi.

Negara anggota IEA, yang hanya mewakili sekitar 16 persen populasi dunia, diketahui memiliki 1,2 miliar barel cadangan publik dan tambahan 600 juta barel yang disimpan industri swasta berdasarkan mandat pemerintah.

Di luar anggota IEA, China diperkirakan memiliki sekitar 1,4 miliar barel cadangan darurat, lebih besar dibanding gabungan cadangan Amerika Serikat, Jepang, negara OECD Eropa, dan Arab Saudi. Negara lain yang juga memiliki cadangan besar ialah India, Uni Emirat Arab, dan Iran.

Menurut estimasi IEA, sekitar 10 negara atau blok menguasai 70 persen

stok minyak global.

Sebaliknya, banyak negara berkembang di Asia dan Afrika justru memiliki bantalan energi yang sangat minim. Peneliti Sustainable Development Policy Institute, Khalid Waleed, mengatakan negara berkembang merupakan pihak yang "paling tidak mampu membayar mahal biaya pembangunan cadangan minyak strategis".

Ia menjelaskan pembangunan cadangan minyak membutuhkan biaya sangat besar mulai dari pembangunan fasilitas, pengisian stok, pembiayaan, rotasi, hingga pengelolaan.

"Cadangan minyak strategis mahal untuk dibangun, diisi, dibiayai, dirotasi, dan dikelola," ujar Waleed kepada Al Jazeera.

Menurut dia, negara-negara dengan tekanan nilai tukar, beban utang tinggi, subsidi energi, serta kebutuhan perlindungan sosial sering kali menganggap penyimpanan jutaan barel minyak sebagai kemewahan, meski secara

strategis sangat penting.

Kawasan Asia Pasifik diperkirakan menjadi wilayah dengan dampak ekonomi terbesar akibat krisis energi global karena banyak negara masih bergantung pada impor energi. Asian Development Bank bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang Asia menjadi 4,7 persen pada 2026, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,1 persen.

Sejumlah negara berkembang di Asia juga mengakui cadangan energi mereka jauh di bawah standar IEA yang mensyaratkan stok minimal setara 90 hari impor.

Menteri Energi Pakistan, Ali Pervaiz Malik, menyebut negaranya hanya memiliki cadangan minyak mentah untuk lima hingga tujuh hari. Sementara pejabat di Indonesia, Bangladesh, dan Vietnam mengatakan cadangan energi mereka hanya cukup untuk sekitar 23 hari hingga satu bulan.

Kepala Riset Sparta di Singapura, Neil Crosby, menilai banyak negara

berkembang bukan hanya kekurangan dana untuk membangun cadangan strategis, tetapi juga menghadapi kendala teknis seperti gangguan jaringan listrik dan kapasitas kilang domestik yang terbatas.

Menurut Crosby, kondisi tersebut membuat negara berkembang sulit mempertahankan stok minyak dalam jumlah besar yang sebenarnya dapat menahan lonjakan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok.

"Pada akhirnya, pertahanan jangka panjang terkuat adalah mempercepat proyek energi terbarukan untuk secara permanen memisahkan pembangkit listrik lokal dari pasar minyak internasional," ujar Crosby kepada Al Jazeera. (wid,ist,rla,kum/dya)

AHY Jamin Harga Tiket Maskapai Naik Terukur

CADANGAN minyak dunia yang terus menipis hingga mendekati level kritis mulai memicu efek berantai ke berbagai sektor, termasuk industri penerbangan. Gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah membuat harga minyak dunia melonjak tajam sehingga harga avtur ikut terkerek. Kondisi tersebut diperkirakan mendorong kenaikan tarif tiket pesawat domestik hingga 35 persen karena maskapai menghadapi lonjakan biaya operasional di tengah tekanan ekonomi global.

Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi dunia.

Menurut AHY, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan nasional dan keterjangkauan harga tiket, terutama menjelang libur sekolah dan Iduladha 1447 Hijriah yang diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat.

"Memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia

seperti ini, tetapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga harga tiket pesawat tidak terlalu memberatkan masyarakat," kata AHY di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Ia menilai kondisi geopolitik global saat ini memberi tekanan besar terhadap banyak sektor ekonomi, termasuk transportasi udara. Konflik internasional disebut berdampak langsung terhadap lonjakan harga energi dunia yang kemudian memicu kenaikan biaya operasional maskapai penerbangan. Pemerintah, kata AHY, harus mengambil langkah penyesuaian yang tidak mudah karena tetap harus mempertimbangkan stabilitas industri sekaligus daya beli masyarakat.

"Oleh karena itu negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang tidak mudah tapi penyesuaian dan memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil," ujarnya.

AHY menambahkan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan untuk mencari formula terbaik agar penyesuaian harga tiket tetap berada dalam batas wajar. Pemerintah juga berharap situasi krisis di Timur

KEBIJAKAN KRISIS ENERGI DI BEBERAPA NEGARA



Bangladesh: Membatasi penggunaan AC maksimal 25°C.



Laos: Minggu sekolah dipangkas dari 5 hari menjadi 3 hari.



Sri Lanka: Rabu dijadikan hari libur untuk hemat bahan bakar.



Pakistan: Pertandingan kriket digelar tanpa penonton demi mengurangi perjalanan.

Rute Khusus Iran

- Iran membuka jalur terbatas di pesisir utara Selat Hormuz untuk kapal negara netral dengan izin ketat.

Rute Perdagangan Alternatif

- Iran mengalihkan sebagian perdagangan lewat Laut Kaspia menuju Rusia dan Asia Tengah.
- Pasokan minyak yang lolos via Laut Merah diteruskan ke Eropa melalui Terusan Suez dan pipa SUMED di Mesir.



Tengah segera membaik sehingga tekanan terhadap pasar energi global dan industri penerbangan dapat perlahan mereda.

"Karena semakin meningkatnya harga energi dunia termasuk untuk sektor penerbangan dan menjadi atensi kita semuanya, kita juga berharap situasi krisis di Timur Tengah ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu," kata AHY. (qid,ist,kum/dya)

Soal Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

RAMAI-RAMAI TEGASKAN WARGA DESA PALING RENTAN

Pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya dilihat dari dampak terhadap sektor keuangan dan dunia usaha, tetapi juga dirasakan masyarakat hingga ke pedesaan. Sejumlah ekonom menilai kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya produksi pertanian, hingga energi menjadi efek nyata yang berpotensi menekan daya beli warga berpenghasilan rendah.

Ekonom dari Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak terlalu terdampak pelemahan rupiah karena tidak bertransaksi menggunakan dolar AS secara langsung.

Menurut Yusuf, dikutip Minggu (17/5/2026) pandangan tersebut keliru secara ekonomi karena mengabaikan dampak depresiasi rupiah terhadap biaya hidup masyarakat bawah, khususnya warga pedesaan yang justru dinilai paling rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Yusuf mengatakan logika tersebut merupakan kekeliruan ekonomi atau fallacy of composition. Menurut dia, dalam sistem ekonomi modern, dampak nilai tukar tidak bekerja berdasarkan apakah seseorang memegang dolar secara langsung atau tidak.

"Dalam ekonomi modern, dampak kurs bekerja lewat rantai pasok, bukan lewat apakah seseorang memegang dolar atau tidak," ujar Yusuf.



Suasana penukaran uang dolar dan rupiah di money changer Jakarta

Sebelumnya, Prabowo menanggapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dengan menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat karena ditopang ketahanan pangan dan energi nasional.

Prabowo juga menilai masyarakat desa tidak perlu terlalu khawatir terhadap pelemahan rupiah maupun

penguatan dolar AS.

"Sekarang ada yang selalu bilang Indonesia akan collapse, akan chaos, rupiah begini, dollar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dollar kok," ujar Prabowo.

Yusuf menjelaskan, banyak kebutuhan masyarakat desa tetap memiliki komponen biaya berbasis dolar AS. Contohnya pupuk urea dan NPK yang bahan bakunya masih

RIWAYAT KURS USD/IDR

- 17 Mei 2026: Rp17.602,95 (Akhir Pekan)
- 16 Mei 2026: Rp17.602,95 (Akhir Pekan)
- 15 Mei 2026: Rp17.602,95
- 14 Mei 2026: Rp17.530,60
- 13 Mei 2026: Rp17.500,00
- 12 Mei 2026: Rp17.549,00
- 11 Mei 2026: Rp17.413,00
- 10 Mei 2026: Rp17.358,00
- 09 Mei 2026: Rp17.339,30 (Akhir Pekan)
- 08 Mei 2026: Rp17.339,30

impur, harga solar yang dipengaruhi harga minyak dunia, hingga pakan ternak yang bergantung pada jagung dan bungkil kedelai impor.

Selain itu, sektor kesehatan juga terdampak karena banyak obat generik menggunakan bahan baku aktif dari India dan China yang pembayarannya memakai dolar AS.

Karena itu, Yusuf menilai pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.500 per dolar AS bukan sekadar persoalan makroekonomi, melainkan dapat langsung memicu kenaikan biaya hidup masyarakat desa melalui mekanisme exchange rate pass-through.

Ia menyebut efek depresiasi rupiah di Indonesia relatif besar. Menurut perhitungannya, pelemahan rupiah sebesar 10 persen dapat mendorong tambahan inflasi sekitar 1,5 hingga 2,5 poin persentase dalam beberapa kuartal berikutnya.

Yusuf juga menyoroti rumah tangga miskin di desa sebagai kelompok yang paling rentan terdampak pelemahan rupiah. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan teori Engel's Law yang menyebut semakin rendah pendapatan rumah tangga, semakin besar proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan energi.

"Sementara dua komponen itu sangat sensitif terhadap depresiasi kurs," katanya.

Menurut Yusuf, data Badan Pusat Statistik selama ini menunjukkan inflasi pangan bergejolak (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered prices) lebih berat dirasakan masyarakat berpendapatan rendah dibanding kelompok menengah perkotaan. (gus,rls,tkn/dya)

Bahlil Bahas Dampak Rupiah Melemah

PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai menjadi perhatian serius pemerintah karena dinilai dapat berdampak langsung terhadap harga bahan bakar minyak (BBM), subsidi energi, harga barang impor, hingga stabilitas pasar keuangan nasional. Pemerintah pun kini memantau ketat pergerakan kurs rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.500 per dolar AS di tengah tekanan ekonomi global dan meningkatnya ketegangan geopolitik dunia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia disebut masih membahas dampak pelemahan rupiah terhadap sektor energi bersama jajaran kementerian lain. Pembahasan itu terutama terkait potensi pengaruh kurs terhadap harga BBM dan besaran subsidi energi pemerintah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan hingga saat ini pemerintah masih menghitung dan memantau perkembangan sebelum mengambil kebijakan lanjutan.

"Kebetulan Pak Menteri bersama

jajaran menteri lain sedang merapatkan hal tersebut, jadi kita tunggu," ujar Laode dikutip dari Antara, Minggu (17/5/2026).

Menurut dia, belum ada keputusan baru terkait penyesuaian harga BBM maupun subsidi energi karena pemerintah masih melihat perkembangan pasar global dan nilai tukar rupiah beberapa waktu ke depan. "Belum ada info-info lain selain yang ada sekarang. Kami lihat perkembangan berikutnya saja nanti," katanya.

Kurs rupiah memang menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan harga BBM nasional selain harga minyak mentah dunia. Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan produk energi membuat fluktuasi dolar AS ikut memengaruhi biaya impor energi. Ketika rupiah melemah, biaya impor menjadi lebih mahal karena transaksi global menggunakan dolar AS.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada sektor subsidi dan kompensasi energi. Pemerintah sebelumnya juga

telah mengalokasikan anggaran besar untuk menjaga harga BBM tetap stabil di tengah gejolak harga minyak dunia.

Pada perdagangan Rabu (13/5), rupiah tercatat berada di level Rp17.515 per dolar AS atau menguat tipis 14 poin dibanding penutupan sebelumnya di Rp17.529 per dolar AS. Meski begitu, level tersebut masih menjadi salah satu titik terlemah rupiah dalam beberapa tahun terakhir dan memunculkan kekhawatiran publik terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Menanggapi situasi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tidak panik. Ia menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibanding masa krisis moneter 1998.

"Enggak perlu panik karena fondasi ekonomi bagus. Kita tahu betul kelemahannya di mana dan bisa kita betulin. Kita enggak akan sejelek seperti 98 lagi," ujar Purbaya di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2026). (wid rls/dya)